



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jl. Mr. Dr. Kusumahatmaja No. 08 Purwakarta ☎ (0264) 200640

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 470 / 131 / DKPS / I / 2023

Tentang

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018 – 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Purwakarta Tahun 2018-2023 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta
Pada Tanggal : 16 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : 470/131/DKPS/1/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023


Visi : **MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU	Target Setiap Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Meningkatnya tata kelola pemerintahan instansi organisasi perangkat daerah	Capaian SAKIP perangkat daerah			B	B	B
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran			80	80	80
Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang kependudukan	Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan	Tingkat kepemilikan Dokumen kependudukan (KTP, KK dan Kartu Identitas Anak (KIA))			95	95	95
Mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pencatatan sipil	Meningkatnya pelayanan dokumen pencatatan sipil	Tingkat kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian)	100	100	100	100	100
Terwujudnya akurasi penyajian data dan pemanfaatan data	Meningkatnya akurasi penyajian data dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase dara kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi /lembaga lainnya			90	95	100

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan	Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK dan Kartu Identitas Anak (KIA))	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP/17 tahun keatas}}$	Bidang Dafduk
		$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yg sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}}$	Bidang Dafduk

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya pelayanan dokumen pencatatan sipil	Tingkat kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	Bidang Layanan Pendaftaran Penduduk
		$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan}} \times 100\%$	
		$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan}} \times 100\%$	
		$\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya akurasi penyajian data dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan oleh instansi /lembaga lainnya	Jumlah penyajian data kependudukan skala kab/kota dlm satu tahun $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100\%$ 2 DKB	Bidang PIAK


 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PURWAKARTA
MUHAMAD HUSNI, SH, MH
 NIP.196704241987031003